



## WALIKOTA PEKANBARU

### PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG  
PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG  
BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014  
UNTUK BULAN JANUARI 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014 dan telah disepakati oleh DPRD Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 07 Oktober 2013;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sambil menunggu hasil Evaluasi Rancangan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014 oleh Pemerintah Provinsi Riau, perlu disediakan kredit anggaran untuk jangka waktu sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru Tahun 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN JANUARI 2014.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Tahun Anggaran 2014 untuk Bulan Januari 2014.

## **BAB IV PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB**

### Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun Anggaran 2014 untuk Bulan Januari 2014, terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Belanja Langsung, meliputi :
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada :
    - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon, air, listrik dan kawat/ faksimili/ internet;
    - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaharaan Dinas/Operasional
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada :
    - a) pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas;
    - b) pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas.
  3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
    - a) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun 2014.

Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Apabila sampai dengan Bulan Februari 2014, APBD belum di perdakan, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Februari 2014 mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib Bulan Januari 2014.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 3 Januari 2014

 **WALIKOTA PEKANBARU** 

  
**FIRDAUS**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	28.733.902.592
	Belanja Tidak Langsung	28.377.518.589
	- Gaji dan Tunjangan	28.377.518.589
	Belanja Langsung	356.384.002
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	356.384.002
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	294.838.169
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	61.545.833
2	DINAS KESEHATAN	2.873.264.929
	Belanja Tidak Langsung	2.670.803.429
	- Gaji dan Tunjangan	2.670.803.429
	Belanja Langsung	202.461.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.461.500
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.867.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	160.594.000
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	389.797.637
	Belanja Tidak Langsung	347.445.303
	- Gaji dan Tunjangan	347.445.303
	Belanja Langsung	42.352.333
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.352.333
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.458.333
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	26.894.000
4	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	-
	Belanja Tidak Langsung	-
	- Gaji dan Tunjangan	-
	Belanja Langsung	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	342.557.151
	Belanja Tidak Langsung	313.277.568
	- Gaji dan Tunjangan	313.277.568
	Belanja Langsung	29.279.583
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.279.583
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.866.667
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17.412.917
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	143.065.430
	- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	108.394.333

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN	266.241.129
	Belanja Tidak Langsung	226.924.296
	- Gaji dan Tunjangan	226.924.296
	Belanja Langsung	39.316.833
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.316.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	30.316.833
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	343.890.246
	Belanja Tidak Langsung	274.880.746
	- Gaji dan Tunjangan	274.880.746
	Belanja Langsung	69.009.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.009.500
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.600.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	28.409.500
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	708.072.057
	Belanja Tidak Langsung	575.416.557
	- Gaji dan Tunjangan	575.416.557
	Belanja Langsung	132.655.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.655.500
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.400.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	80.255.500
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	177.502.288
	Belanja Tidak Langsung	150.911.122
	- Gaji dan Tunjangan	150.911.122
	Belanja Langsung	26.591.167
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.591.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.490.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	17.101.167
10	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.170.812.272
	Belanja Tidak Langsung	275.144.973
	- Gaji dan Tunjangan	275.144.973
	Belanja Langsung	895.667.298
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	659.803.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	629.583.333
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	30.220.333
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	113.745.257
	- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	113.745.257
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	141.442.683
	- Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	67.014.445
	- Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	22.052.944
	- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	22.814.301
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	122.118.375
	- Penataan RTH	66.573.458

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	- Pemeliharaan RTH	55.544.917
	- Peningkatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan lingkungan	20.613.750
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	430.202.827
	Belanja Tidak Langsung	394.716.661
	- Gaji dan Tunjangan	394.716.661
	Belanja Langsung	35.486.167
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	35.486.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.100.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	31.386.167
12	DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN	234.650.944
	Belanja Tidak Langsung	190.155.860
	- Gaji dan Tunjangan	190.155.860
	Belanja Langsung	44.495.083
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44.495.083
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.250.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37.245.083
13	DINAS TENAGA KERJA	263.667.509
	Belanja Tidak Langsung	232.204.342
	- Gaji dan Tunjangan	232.204.342
	Belanja Langsung	31.463.167
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.463.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.180.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.283.167
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	181.420.496
	Belanja Tidak Langsung	154.846.225
	- Gaji dan Tunjangan	154.846.225
	Belanja Langsung	26.574.271
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.574.271
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.066.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.507.604
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	206.853.518
	Belanja Tidak Langsung	189.393.435
	- Gaji dan Tunjangan	189.393.435
	Belanja Langsung	17.460.083
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.460.083
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.916.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.543.417

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	211.915.868
	Belanja Tidak Langsung	193.517.952
	- Gaji dan Tunjangan	193.517.952
	Belanja Langsung	18.397.917
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.397.917
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.950.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	9.447.917
17	BADAN KESBANG DAN POLITIK	205.586.664
	Belanja Tidak Langsung	186.351.456
	- Gaji dan Tunjangan	186.351.456
	Belanja Langsung	19.235.208
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.235.208
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.450.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	15.785.208
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	768.370.393
	Belanja Tidak Langsung	697.274.559
	- Gaji dan Tunjangan	697.274.559
	Belanja Langsung	71.095.833
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.095.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	71.095.833
19	DPRD	983.526.388
	Belanja Tidak Langsung	983.526.388
	- Gaji dan Tunjangan	983.526.388
20	KDH & WKDH	21.479.490
	Belanja Tidak Langsung	21.479.490
	- Gaji dan Tunjangan	21.479.490
21	SEKRETARIAT DAERAH	2.891.446.722
	Belanja Tidak Langsung	2.056.318.889
	- Gaji dan Tunjangan	2.056.318.889
	Belanja Langsung	835.127.833
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	698.439.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	302.993.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	395.445.667
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	136.688.667
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	136.688.667
	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi	75.000.000
	- Kegiatan Penyusunan Sistem informasi dan informasi layanan Publik	75.000.000
22	SEKRETARIAT DPRD	1.513.499.652
	Belanja Tidak Langsung	1.382.410.485
	- Gaji dan Tunjangan	1.382.410.485
	Belanja Langsung	131.089.167

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	131.089.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.300.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	61.789.167
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan	-
23	INSPEKTORAT KOTA	266.231.945
	Belanja Tidak Langsung	245.570.278
	- Gaji dan Tunjangan	245.570.278
	Belanja Langsung	20.661.667
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.661.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	900.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	19.761.667
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	354.513.468
	Belanja Tidak Langsung	331.655.134
	- Gaji dan Tunjangan	331.655.134
	Belanja Langsung	22.858.333
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.858.333
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.666.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	18.191.667
25	DINAS PENDAPATAN DAERAH	656.643.530
	Belanja Tidak Langsung	585.384.738
	- Gaji dan Tunjangan	585.384.738
	Belanja Langsung	71.258.792
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.258.792
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.416.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	51.842.125
26	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	476.972.316
	Belanja Tidak Langsung	426.068.247
	- Gaji dan Tunjangan	426.068.247
	Belanja Langsung	50.904.069
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.904.069
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.333.333
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	39.570.735



NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
27	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	338.083.815
	Belanja Tidak Langsung	292.778.873
	- Gaji dan Tunjangan	292.778.873
	Belanja Langsung	45.304.942
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.141.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.300.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	9.841.667
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	28.163.275
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	28.163.275
28	KECAMATAN SENAPELAN	313.993.626
	Belanja Tidak Langsung	257.297.209
	- Gaji dan Tunjangan	257.297.209
	Belanja Langsung	56.696.417
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.818.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.541.667
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	5.276.500
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	45.878.250
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	45.878.250
29	KECAMATAN SUKAJADI	389.176.694
	Belanja Tidak Langsung	337.314.669
	- Gaji dan Tunjangan	337.314.669
	Belanja Langsung	51.862.025
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.737.500
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.800.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	11.937.500
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	34.124.525
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	34.124.525
30	KECAMATAN SAIL	246.017.382
	Belanja Tidak Langsung	214.450.915
	- Gaji dan Tunjangan	214.450.915
	Belanja Langsung	31.566.467
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.294.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.227.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Dinas/Operasional	7.067.167
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.271.800
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	19.271.800

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
31	KECAMATAN LIMAPULUH	306.615.441
	Belanja Tidak Langsung	267.236.387
	- Gaji dan Tunjangan	267.236.387
	Belanja Langsung	39.379.054
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.391.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.980.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	10.411.667
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22.987.388
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	22.987.388
32	KECAMATAN RUMBAI	788.505.255
	Belanja Tidak Langsung	717.346.072
	- Gaji dan Tunjangan	717.346.072
	Belanja Langsung	71.159.183
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.770.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.250.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	11.520.833
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	56.388.350
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	56.388.350
33	KECAMATAN RUMBAI PESISIR	269.281.974
	Belanja Tidak Langsung	233.067.641
	- Gaji dan Tunjangan	233.067.641
	Belanja Langsung	36.214.333
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.695.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.100.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	11.595.833
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.518.500
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	19.518.500
34	KECAMATAN BUKIT RAYA	277.837.388
	Belanja Tidak Langsung	235.386.854
	- Gaji dan Tunjangan	235.386.854
	Belanja Langsung	42.450.533
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.498.583
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.250.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	6.248.583
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	31.951.950
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	31.951.950

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
35	KECAMATAN TAMPAN	322.574.756
	Belanja Tidak Langsung	278.956.486
	- Gaji dan Tunjangan	278.956.486
	Belanja Langsung	43.618.270
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.886.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.091.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.795.167
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26.731.437
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	26.731.437
36	KECAMATAN TENAYAN RAYA	294.170.952
	Belanja Tidak Langsung	247.303.536
	- Gaji dan Tunjangan	247.303.536
	Belanja Langsung	46.867.417
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.730.167
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.391.667
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.338.500
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	32.137.250
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	32.137.250
37	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	237.831.296
	Belanja Tidak Langsung	212.467.296
	- Gaji dan Tunjangan	212.467.296
	Belanja Langsung	25.364.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.961.625
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.575.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.386.625
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	18.402.375
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	18.402.375
38	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	369.511.197
	Belanja Tidak Langsung	314.161.399
	- Gaji dan Tunjangan	314.161.399
	Belanja Langsung	55.349.798
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.786.583
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.462.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.324.583
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	42.563.215
	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	42.563.215
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Belanja Tidak Langsung	
	- Gaji dan Tunjangan	296.564.323
	Belanja langsung	

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
39	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	345.214.988
	Belanja Tidak Langsung	323.360.838
	- Gaji dan Tunjangan	323.360.838
	Belanja Langsung	21.854.150
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.854.150
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.900.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	16.954.150
40	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	425.564.838
	Belanja Tidak Langsung	395.378.963
	- Gaji dan Tunjangan	395.378.963
	Belanja Langsung	30.185.875
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.185.875
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.050.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	22.135.875
41	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	94.254.511
	Belanja Tidak Langsung	62.623.178
	- Gaji dan Tunjangan	62.623.178
	Belanja Langsung	31.631.333
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.631.333
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.593.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	6.038.333
42	DINAS PERTANIAN	345.092.134
	Belanja Tidak Langsung	301.390.501
	- Gaji dan Tunjangan	301.390.501
	Belanja Langsung	43.701.633
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43.701.633
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.850.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	32.851.633
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	421.868.546
	Belanja Tidak Langsung	399.897.713
	- Gaji dan Tunjangan	399.897.713
	Belanja Langsung	21.970.833
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.970.833
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.383.333
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	16.587.500

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
44	DINAS PASAR	656.410.270
	Belanja Tidak Langsung	604.320.354
	- Gaji dan Tunjangan	604.320.354
	Belanja Langsung	52.089.917
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52.089.917
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.035.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	
	- Dinas/Operasional	26.054.917


**WALIKOTA PEKANBARU**

  

  
**H. FIRDAUS**